

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus untuk menyempurnakan laporan berikut pelaksanaannya.

Demikian Laporan Rencana Kerja Perubahan PD Kecamatan Turi Tahun 2025 dan mudah – mudahan bermanfaat.

Turi, Juni 2025

CAMAT TURI

RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19730328 199502 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan	23
2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB. III. TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA (RENJA)	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja OPD Tahun 2025	28
3.3. Perubahan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025	31
BAB. V. P E N U T U P	44

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA Perubahan SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Turi dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD di tahun – tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 PD Kecamatan Turi yang selanjutnya disebut RENJA PERUBAHAN adalah dokumen perencanaan pembangunan PD Kecamatan Turi, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan atan untuk mewujudkan bentuk dan capaian kinerja PD yang akan dicapai pada masa satu tahun. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan

yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top- Down (Atas - Bawah) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program jenjang pemerintahan diatasnya.
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Frencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Lamongan.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2011-2031
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025
25. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 10 tahun 2021 tentang RPJMD Lamongan tahun 2021-2026;
26. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 30 tahun 2023 tentang RKPD Lamongan 2025.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 tahun 2025 tentang perubahan RKPD 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Turi tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran strategis, program – program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Turi.

BAB I PENDAHULUAN

Padabagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja Perubahan PD, proses penyusunan renja Perubahan PD, keterkaitan antara renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, Renja Perubahan KIL dan renja Perubahan Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2 atau 2023) dan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau 2025) s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2025) yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan /atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain ;

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor- faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undang yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika PD yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan PD yang bersangkutan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional (internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals));
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas perubahan program/ kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD lain, berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan perubahan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan perubahan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut perubahan arah kebijakandan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan perubahan program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan Ke I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

OPD Kecamatan Turi telah mengevaluasi hasil pelaksanaan Kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Turi telah mengevaluasi 6 (enam) Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sebagaimana uraian berikut:

2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : NIHIL

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan :

NO	PROGRAM TAHUN 2024	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.474.216.655,00	2.229.358.445	90.10
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	34.000.000	32.980.000	97
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	51.400.000	48.900.000	95.14

	Dan Kelurahan			
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000	9.900.000	99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	9.900.000	99
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	78.500.000	75.680.000	96.41

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Nihil

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan ;

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor Penyebab :

- Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, ada faktor internal, yakni kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing – masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM (Personil) di Kecamatan

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Faktor penyebab:

- Masih banyak masyarakat di Kecamatan Turi yang belum mengerti tentang pentingnya Musyawarah Rencana Pembangunan.
- Kurangnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- Masih minimnya sarana dan prasarana di bidang olahraga sehingga kemampuan untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga tidak bisa maksimal dilakukan oleh pemuda dan masyarakat.
- Pembinaan kepemudaan dan keaktifan berorganisasi masih sangat kurang sehingga kebanyakan organisasi kepemudaan berkembang secara diam-diam dan kurang terkontrol.
- Masih kurangnya personil pada bagian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Turi.

- Masih kurangnya personil Linmas di masing-masing Desa dan linmas yang ada belum berjalan secara maksimal.
- Masih banyak perangkat Desa yang belum mengerti dan paham bagaimana cara membuat dan menyusun APBD Desa dan Perdes yang baik.
- Masih banyak Desa yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan Laporan APBD Desa.
- Masih minimnya SDM aparatur Desa/ perangkat Desa sehingga dalam melaksanakan tata pemerintahan Desa masih kurang optimal dan maksimal.
- Masih minimnya pelayanan untuk masyarakat miskin (RTM) di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sehingga belum bisa terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat miskin (RTM).
- Lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga masih banyak masyarakat di Wilayah Kecamatan Turi yang menganggur.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra SKPD adalah :

1. Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan baik
2. Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah dengan baik.
3. Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah dengan baik.
4. Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
5. Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
6. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
8. Meningkatnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kebijakan :

- Perlu adanya kelengkapan sarana komputer guna menunjang kinerja staff atau pejabat struktural, sehingga kinerja Kecamatan Turi bisa meningkat.

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kebijakan:

- Perlu peningkatan kesadaran dan kehadiran dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan.
- Perlu adanya pembinaan kepemudaan secara kontinyu dan peningkatan sarana dan prasarana yang lebih baik di bidang olahraga.
- Perlu adanya penambahan personil, pembinaan dan sarana prasarana penunjang tugas linmas di desa.
- perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis pada perangkat Desa dalam pembuatan dan penyusunan APBD Desa.
- Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.
- Perlu adanya lapangan kerja baru melalui sektor industri dan non industri dengan standart UMK yang memadai dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan secara terprogram dan berkelanjutan.

Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja OPD Kecamatan Turi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 2.415.958.739,00 adapun Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 565.918.956 atau sebesar (23.42%).
Terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 12.297.900,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%).
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 2.133.231.396,00,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 501.439.614,- atau sebesar (23.50%).
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi, Dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 0,- dan realisasi anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%)

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp 17.750.700 dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.600.000,- atau sebesar (9.01 %).
5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 13.487.200,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah Rp. 0,- atau sebesar (0%)
6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 203.200.643,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 66.429.342,- atau sebesar (32.69%).
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 35.990.900,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.400.000,- atau sebesar (6.6%)

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 24.643.400,- adapun Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%). Terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatandengan perincian sebagai berikut :

1. Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 4.010.000,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%).
2. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Dengan pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 20.633.400,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%)

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 29.125.000,- adapun Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp.2.000.000,- atau sebesar (6.9%). Terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 4.125.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar (48.48%).
2. Peningkatan Ketahanan Pangan Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar (0%).

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 2.750.000,-. Adapun realisasi anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Terdiri dari satu kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Koordinasi Upayan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum dengan pagu anggaran Rp. 2.750.000 dan Realisasi anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 2.750.000,-. Adapun realisasi anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%. Terdiri dari satu kegiatan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.750.000 dan Realisasi anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Pagu Anggaran Program sebesar Rp. 28.433.600,- adapun Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.400.000,- atau sebesar (22.5%). Terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fasilitas Penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan. Dengan Pagu Anggaran Kegiatan sebesar Rp. 28.433.600,- dan Realisasi Anggaran s/d Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.400.000- atau sebesar (22.5%).

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Turi yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kabupaten Lamongan

OPD : Kecamatan Turi

No	Sasaran kinerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD 2025 s/d triwulan I		Catatan /Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	85.73	84.32	84.48	84.70	100,1%	85.11	-	
		7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	16 dokumen/laporan	16 dokumen/laporan	16 dokumen/laporan	16 dokumen/laporan	100%	16 dokumen/laporan	10 dokumen/laporan	
		7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	28 spj/laporan	28 spj/laporan	28 spj/laporan	28 spj/laporan	100%	28 spj/laporan	8 spj/laporan	
		7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	-		
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	63 Jenis	63 Jenis	63 Jenis	63 Jenis	100%	100 %	25%	
		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	

No	Sasaran kinerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD 2025 s/d triwulan I		Catatan /Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Layanan Jasa Penunjang Yang Tersedia Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25 %	
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	100%	25%	
		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	-	

No	Sasaran kinerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD 2025 s/d triwulan I		Catatan /Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25 %	
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Koordinasi Pemberdayaan Desa	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	100%	25%	
		7	01	03	2.02	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	95 Keluarga	95 Keluarga	95 Keluarga	95 Keluarga	100%	95 Keluarga	40 Keluarga	
		7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Konflik Yang Tertangani	100%	-	100%	100%	100%	100%	25%	

No	Sasaran kinerja	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD 2025 s/d triwulan I		Catatan /Keterangan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)	Target	Realisasi	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7	01	04	2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Desa upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	100%	25%	
		7	01	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	-	100%	100%	100%	100%	25%	
		7	01	05	2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	5 kegiatan	-	5 kegiatan	5 kegiatan -	100%	100%	25%	
		7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Naik Kelas	52.63 %	31.50 %	47.36 %	31.50 %	149.96	21.05 %	-	
		7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan	Jumlah Laporan fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

No	Sasaran kinerja	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD 2025 s/d triwulan I		Catatan /Keterangan
							Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemerintahan Desa									

Turi, Juni 2025

CAMAT TURI



RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730328 199502 1 002

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur organisasi Kecamatan Turi dibentuk berdasarkan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan. Yang mana Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat Turi dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 4 (empat) orang Kepala Saksi serta 2 (dua) Kasubbag.

Tugas Camat/Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.

Fungsi camat adalah sebagai:

1. Pengkoordinasian segala kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang terpadu di tingkat Kecamatan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan administrasi serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Kecamatan.
4. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas camat sebagai unsur staf pemerintahan daerah/satuan kerja pemerintahan daerah adalah berkedudukan membantu kepala daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan, camat bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Sesuai peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 85 tahun 2020 tentang struktur organisasi kecamatan dan kelurahan di kabupaten lamongan sebagai berikut:



Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan Turi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Turi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Turi sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja layanan Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

No	Indikator Sasaran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025		2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai IKM	81.20	83.22	83.85	84.48	85.11	84.32	85.11	85.73	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa		Nilai SAKIP Kecamatan	81.00	81.00	81.80	81.91	82	82.70	82.15	82.20	
			Jumlah Desa Maju	8 Desa	8 Desa	9 Desa	9 Desa	4 Desa	5 Desa	4 Desa	1 Desa	
			Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Presentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Konflik yang tertangani	-x-	-x-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase Urusan Pemerintahan umum yang diselenggarakan	-x-	-x-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Prosentase Desa Naik Kelas	26,32	26,32	36,84	42.11	21.05	31.5	21.05	47.37	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi

2.3.1 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Turi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD KecamatanTuri. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Turi dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayananpublik

2.3.2 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan SKPD Kecamatan Turi sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Turi masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait perangkat komputer maupun koneksi internet yang masih belum memadai sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan penyelesaian pekerjaan masih seringkali terlambat.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia masih belum maksimal, sehingga tenaga yang ada terkadang masih belum bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
3. Belum terpenuhinya semua usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Turi hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
4. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Turi sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Turi terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu seringkali tergenang air banjir sehingga usia teknis menjadi pendek ;

2.3.3. Adapun dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian program nasional/internasional , seperti NSPK, SMP dan SDGs (sustainable development goals) adalah :

- a. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
 1. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, UPT Dinas /Instansi, dan Kepala Desa se Kecamatan Turi setiap bulan.

2. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa, se Kecamatan Turi setiap bulan.
3. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Turi setiap bulan
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.
 1. Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin
 2. Pelayanan Pendistribusian Dana PSKS, PKH dan Penyaluran bantuan Pendidikan GNOTA kepada para Siswa – Siswi tidak mampu yang berprestasi
 3. Terlaksananya pelayanan Kesehatan antara lain Jamkesmas, BPJS, Askes dan lain-lain.
 4. Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.
 5. Pelayanan Surat Pernyataan Miskin
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan “
 1. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan Balai Desa.
 2. Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta pelaporan.
- d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat
Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima.
- e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan “
 1. Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat masuk dan keluar, jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian setiap Bulan serta Penyelenggaraan dan penyerataan sistem kelembagaan.
 2. Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum’at dan Apel pagi / sore setiap hari kerja serta penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja.
 3. Mengikutsertakan Diklat PIM bagi staf yang menduduki jabatan dan Diklat Teknis.
- f. **Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Kecamatan Turi. “**
 1. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;

2. Terwujudnya penaggulangan dan penanganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan Turi.
3. Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
4. Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara, penertiban terhadap pedagang kaki lima, warung – warung , pemberantasan miras.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Kecamatan Turi ;

Peningkatan pelayanan masyarakat Kecamatan Turi memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal itu diperlukan analisi yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan(Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Treats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Turi didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni

1. Kekuatan (Strengths)
 - Tersedianya jumlah SDM
 - Terciptanya hubungan yang harmonis antar instansi pemerintahan dan tokoh masyarakat
2. Kelemahan (Weakness)
 - Pelayanan masih belum prima
 - Sarana dan prasarana yang terbatas
 - Administrasi belum tertib
 - Kualitas SDM masih belum memadai ;
 - Personil/Karyawan masih kurang ;
 - Tuntutan masyarakat yang tinggi ;
3. Peluang :
 - Jarak dekat dengan Kota
 - Seluruh Desa dapat diakses dengan roda 4 (empat)
 - Jumlah Penduduk yang mendukung
 - Tingkat Ekonomi masyarakat yang memadai
 - Berkembangnya pemukimn yang dihuni oleh masyarakat terdidik
 - Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan

- Berkembangnya sarana perekonomian
- Kondisi masyarakat yang heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

2.3.5. Formulasi Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
7. Program-program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui PAK

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes.
- b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan dan seluruh Desa yang ada

TABEL 2.4
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

No	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1					
2					
3		N I H I L			
4					
5					
6					
7					
9					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Turi antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025 oleh Kecamatan Turi adalah :

1. Program Nasional : -
Program OPD : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Nasional : -
Program OPD : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Nasional : -
Program OPD : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Nasional : -
Program OPD : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Nasional : -
Program OPD : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Nasional : -
Program OPD : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. 2. Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Turi tahun 2025

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Turi. Adapun tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Turi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Turi adalah sebagai berikut :

1). Tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program. Meningkatkan presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

Sasaran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dibidang administrasi Umum, Perlengkapan, Kerumah tanggaan, Kelembagaan, Kehumasan, Kepegawaian, Keuangan dan Urusan Program Meningkatkan presentase kehadiran aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran.

2). Tujuan Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Meningkatkan cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

Sasaran

Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang tercukupi dengan baik sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan.

3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

Sasaran

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dibidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) bina usaha (Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal) Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;

4.) Tujuan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum , menjalin sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di kecamatan Turi

Sasaran

Meningkatnya kualitas jumlah sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di kecamatan, sehingga tercipta Lingkungan Kecamatan Turi Yang Aman Nyaman dan Kondusif.

5.) Tujuan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dengan mengadakan sejumlah koordinasi urusan Pemerintahan Umum.

Sasaran

Meningkatnya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan mengadakan sejumlah Pembinaan tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

6.) Tujuan Program Pembinaan Pengawasan Pemerintah Desa

Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi administrasi tata pemerintah desa, pengelolaan keuangan pendayagunaan aset daerah, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Sasaran

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi administrasi tata pemerintah desa, pengelolaan keuangan pendayagunaan aset daerah, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan desa, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa..

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Turi Tahun 2025 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan SKPD Kecamatan Turi dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2025, dan sebagai bahan evaluasi kerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. 3. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Program dan kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
3. Peraturan Kepala PD tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026
4. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 maupun Renja PD Tahun 2025
5. SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian SPM (standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia)
6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
7. Target indicator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah, Nota Kesepakatan Daerah, Indikator Kinerja Utama Provinsi

Adapun penjelasan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya:

1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah:

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkelanjutan"

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yaitu :

"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif"

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan yaitu:

- Tujuan : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- Indikator Sasaran : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Nilai Manajemen Resiko

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan sebagaimana Tabel dibawahini.

a. Jumlah Perubahan Program dan Kegiatan tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU (sesudah perubahan) (Rp.)	JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG PN (KORTEKRENBANG)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Turi	6	13	2.503.660.739,	-	Camat Turi

C. Penjelasan rumusan Program dan Kegiatan yang berubah atau tidak sesuai dengan RKPD tahun 2025, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ada penyesuaian pagu Indikatif, dimana semula Rp. 2.428.283.963 menjadi Rp. 2.415.958.739. Pada Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang semula Rp. 24.600.000.- menjadi Rp. 12.297.900.-. Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Pagu Indikatif semula Rp 1.900.367.620 menjadi Rp. 2.133.231.396. Pada kegiatan ini mengalami kenaikan pagu dikarenakan ada penyesuaian penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Di bulan Mei ada penerimaan 2 CPNS dan 7 PPPK Baru. Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada penurunan Pagu indikatif yang semula Rp. 32.155.600 Menjadi Rp. 17.750.700. Pada kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tidak ada perubahan pagu indikatif. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang semula Rp. 263.193.643 turun

menjadi Rp. 203.200.643. Hal ini terjadi karena ada 7 tenaga Honorer yang telah diangkat menjadi Tenaga PPPK. Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah ada penurunan pagu indikatif yang semula Rp. 55.020.000 menjadi Rp. 35.990.900.-.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Pagu Indikatif Yang semula Rp. 18.859.900.- Menjadi Rp. 24.643.400.-. hal ini terjadi karena ada penambahan Pagu pada Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, ada penyesuaian Efisiensi Anggaran yang semula Rp. 53.100.000 turun menjadi Rp. 29.125.000. Penurunan ini terjadi karena pada Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan sudah tidak dilaksanakan lagi. Pagu Indikatif dengan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang semula Rp. 41.753.000,- bertambah menjadi Rp. 53.753.000.-
- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ada penyesuaian Efisiensi Anggaran yang semula Rp. 10.000.000.- menjadi Rp. 2.750.000.-
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ada penyesuaian Efisiensi Anggaran yang semula Rp. 10.000.000.- menjadi Rp. 2.750.000.-
- 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, ada penyesuaian Efisiensi Anggaran yang semula Rp. 47.500.000.- menjadi Rp. 28.433.600.-. Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Ada Penurunan Pagu Indikatif Sebesar Rp. 19.066.400. Banyak Pagu Sub Kegiatan Dilakukan Efisiensi dengan mempertahankan kualitas pelayanan yang akan dilakukan.

TABEL 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN YANG TEPAT	100%	PERSENTASE JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN YANG TEPAT	100%	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	2.428.283.963	2.415.958.739	-12.325.224	-
7	0	0	2		<u>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat</u>	<u>100%</u>	<u>Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>24.600.000</u>	<u>12.297.900</u>	-12.302.100	-
7	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Selaras Yang Tersusun Tepat Waktu	1 Dokumen Renja, 1 Dokumen Renja perubahan, 1 Dokumen Renstra	jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Selaras Yang Tersusun Tepat Waktu	1 Dokumen Renja, 1 Dokumen Renja perubahan, 1 Dokumen Renstra	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	8.200.000	4.099.300	-4.100.700	-
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun dengan baik	1 Dokumen RKA	jumlah dokumen RKA yang tersusun dengan baik	1 Dokumen RKA	Kecama tan Turi	Kecamat an Turi	8.200.000	4.099.300	-4.100.700	-
7	0	0	2	0	Evaluasi Kiinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD dan Evaluasi Renja	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	8.200.000	4.099.300	-4.100.700	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2		<u>Administrasi Keuangan</u>	<u>Presentase Aparatur yang Disiplin</u>	<u>100%</u>	<u>Presentase Aparatur yang Disiplin</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>1.900.367.620</u>	<u>2.133.231.396</u>	<u>232.863.776</u>	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan tepat waktu	14 SPJ Gaji Dan 14 Spj TPP	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 SPJ Gaji Dan 14 Spj TPP	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	1.883.867.620	2.124.926.396	241.058.776	-
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 Laporan Akhir Tahun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Akhir Tahun	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	8.250.000	4.125.000	-4.125.000	-
7	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semes teran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	3 dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	3 dokumen	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	8.250.000	4.180.000	-4.070.000	-
7	0	0	2	0	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>32.155.600</u>	<u>17.750.700</u>	<u>-14.404.900</u>	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	7 jenis	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	7 jenis	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	4.517.600	3.007.800	-1.509.800	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	jumlah jenis/item peralatan rumah tangga yang tersedia	2 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	8.500.000	6.374.900	-2.125.100	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis/item peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis	jumlah jenis/item peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	4.088.000	4.088.000	-	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis/item bahan logistik kantor	35 jenis	jumlah jenis/item bahan logistik kantor	35 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	8.250.000	0	-8.250.000	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12 jenis	jumlah jenis barang cetakan dan pengadaan yang tersedia	12 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	5.000.000	2.480.000	-2.520.000	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan perundang undangan	12 bulan	Jumlah Bahan Bacaan Dan perundang undangan	12 bulan	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	1.800.000	1.800.000	-	-
7	0	0	2	0	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>13.487.200</u>	<u>13.487.200</u>	-	-
7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpenuhi	2 jenis	Jumlah Peralatan Kantor yang terpenuhi	2 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	13.487.200	13.487.200	-	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2		<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Prosentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>263.193643</u>	<u>203.200.643</u>	<u>-59.993.000</u>	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 jenis	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	2 jenis	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	55.753.000	55.753.000	-	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	11.283.000	16.390.000	5.107.000	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	jumlah jasa pelayanan umum kantor	2 jenis	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	196.157.643	131.057.643	-65.100.000	-
7	0	0	2	0	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	<u>Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</u>	<u>100%</u>	<u>Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>55.020.000</u>	<u>35.990.900</u>	<u>-19.029.100</u>	-
7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor jumlah perbaikan kendaraan dinas/ operational yang terpenuhi	9 unit 9 unit	jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan bermotor jumlah perbaikan kendaraan dinas/ operational yang terpenuhi	9 unit 9 unit	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	15.020.000	15.990.900	970.900	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	40.000.000	20.000.000	- 20.000.000	-
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PRESENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	100%	PRESENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	100%	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	18.859.900	24.643.400	5.783.500	-
7	0	0	2	0	<u>Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</u>	<u>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan</u>	<u>100%</u>	<u>Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>10.000.000</u>	<u>4.010.000</u>	<u>-5.990.000</u>	<u>-</u>
7	0	0	2	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5 kegiatan	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dg perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5 kegiatan	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	10.000.000	4.010.000	-5.990.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2	2	<u>Penyelenggara n urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</u>	<u>PersentasePenyelenggara an urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</u>	100%	<u>PersentasePenyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan</u>	100%	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>8.859.900</u>	<u>20.633.400</u>	11.773.500	
7	0	0	2	0	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 kegiatan	Jumlah Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 kegiatan	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	8.859.900	20.633.400	11.773.500	
7	0	0	3		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROSENTASE JUMLAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	PROSENTASE JUMLAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	53.100.000	29.125.000	-23.975.000	-
7	0	0	3	1	<u>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</u>	<u>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</u>	100%	<u>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</u>	100%	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>28.100.000</u>	<u>4.125.000</u>	-23.975.000	-
7	0	0	3	1	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan	Jumlah Dusun di kecamatan turi	53 Dusun	Jumlah Dusun di kecamatan turi	53 Dusun	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	19.850.000	0	- 19.850.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	19 desa	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	19 desa	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	8.250.000	4.125.000	-4.125.000	
7	0	0	2	0	<u>Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan</u>	<u>Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan</u>	<u>100%</u>	<u>Persentase Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>25.000.000</u>	<u>25.000.000</u>	-	-
7	0	0	2	0	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Kecamatan Turi)	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	95 keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	95 keluarga	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	25.000.000	25.000.000	-	-
7	0	0	2	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	Persentase Konflik yang tertangani	100%	Kecamatan Turi	Kecamatan Turi	10.000.000	2.750.000	-7.250.000	-
7	0	0	2	0	<u>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>5 keg</u>	<u>Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</u>	<u>5 keg</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>Kecamatan Turi</u>	<u>10.000.000</u>	<u>2.750.000</u>	<u>-7.250.000</u>	-

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
							Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1						2	3				4		5			6
7	0	0	2	0	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 keg	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa	5 keg	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	10.000.000	2.750.000	-7.250.000	-
7	0	0				PROGAM PENYELENGGA RAAN URUSAN Pemerintahan UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100%	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	100%	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	10.000.000	2.750.000	-7.250.000	-
7	0	0	2	0	1	<u>Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</u>	<u>jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum</u>	<u>5 keg</u>	<u>jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum</u>	<u>5 keg</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	10.000.000	2.750.000	-7.250.000	-
7	0	0	2	0	2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	5 keg	jumlah kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	5 keg	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	10.000.000	2.750.000	-7.250.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Ururan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH	100%	PERSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DI BIDANG PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN, SOSIAL DAN PEMBANGUNAN WILAYAH	100%	Kecamat an Turi	Kecamat an Turi	47.500.000	28.433.600	-19.066.400	-
7	0	0	2		<u>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</u>	<u>Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan, dan Sosial dan Pembangunan Wilayah</u>	<u>100%</u>	<u>Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan, dan Sosial dan Pembangunan Wilayah</u>	<u>100%</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>Kecamat an Turi</u>	<u>47.500.000</u>	<u>28.433.600</u>	<u>-19.066.400</u>	-
7	0	0	2	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa	19 desa	jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa	19 desa	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	7.500.000	5.087.000	-2.413.000	-
7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah desa yang difasilitasi pegelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa	19 desa	jumlah desa yang difasilitasi pegelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa	19 desa	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	7.500.000	5.087.000	-2.413.000	-
7	0	0	2	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah desa difasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19 desa	jumlah desa difasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	19 desa	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	10.000.000	5.431.000	-4.569.000	-

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			K E T
						Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Sebelum Perubah an	Sesudah Perubah an	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	
1					2	3				4		5			6
7	0	0	2	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah desa difasilitasi dlm Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 desa	jumlah desa difasilitasi dlm Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	19 desa	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	7.500.000	4.578.600	-2.921.400	-
7	0	0	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	2 pelatihan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	2 pelatihan	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	7.500.000	4.125.000	-3.375.000	-
7	0	0	2	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan	2 kegiatan	jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan	2 kegiatan	Kecamata n Turi	Kecamat an Turi	7.500.000	4.125.000	-3.375.000	-
					Jumlah							<u>2.428.283.963</u>	<u>2.503.660.739</u>	<u>75.376.776</u>	

Turi, Juni 2025

CAMAT TURI



RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19730328 199502 1 002

BAB V

P E N U T U P

- a. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Turi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Turi merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksananya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disebuah Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.
- b. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya
- c. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana kerja SKPD Kecamatan Turi dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD
- d. Rencana tindak lanjut SKPD Kecamatan Turi pada tahun ini menetapkan 6 (enam) program sesuai dengan program kewilayahan yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. Adapun Program yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik.
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Program Penyelenggaraan Urusab Pemerintahan Umum
 6. Program Pembinaan Dan Pngawasan Pemerintah Desa

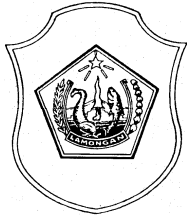
Demikian Rencana Kerja Perubahan SKPD Kecamatan Turi tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja SKPD Kecamatan Turi tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Turi, Juni 2025

CAMAT TURI



RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19730328 199502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TURI

Jl. Raya Kepatihan Nomor 49 Turi Kode Pos 62252
Telp. (0322) 322170 Email :turi@lamongan.kab.go.id
Web site:www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 000.7.2/ 26 /KPTS/413.321/2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENCANA KERJA)
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

CAMAT TURI
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2025, perlu Menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Turi Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

9. Peraturan Gubernur No18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Tanggal 9 juni 2025, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Nomor 18 seri E.
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan
11. Peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 10 tahun 2021 tentang RPJMD Lamongan tahun 2021-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang RKPD Lamongan 2025
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan RKPD Lamongan 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Turi merupakan penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2025;
- KETIGA : Perubahan Renja Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua menjadi pedoman penyusunan Perubahan RKA Kecamatan Turi Tahun 2025;
- KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Tahun 2026 disusun sebagai berikut :
- BAB I. PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
 - BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal

RKPD dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat;

- BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan program dan kegiatan, Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025;
- BAB IV. PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Juni 2025


CAMAT TURI
RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.M.